

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abadi. Pembangunan PLTA Peusangan 1&2 Hydro Power Plant Pada Area Downstream (Headpond).” *Universitas Medan Area*, 2022.
- Anjely, Vina. “Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Dalam Penyelesaian Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan PLTA Peusangan Di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.” *UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2022..
- Aris Prio Agus Santos,(2022). *Pengantar Metode penelitian Hukum*. Yogyakarta :Pustaka baru press.
- Amiruddin & Zainal (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Raja Grafindo Persada.
- Budi Harsono, 2005. *Hukum Agraria Indonesi: Sejarah Pembentukan Undang-undang pokok Agraria*, Jakarta:Djambatan.
- Djoni Sumardi Gozali, (2019) *Hukum Pengadaan Tanah Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djulaeka, Devi Rahayu.(2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka.
- Maskur Hidayat, (2016) *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Nurmaningsih Amriani, (2021). *Mediasi Alternatif penyelesain sengketa perdata di pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Sidiq Armia, (2022) *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian konstitusi indonesia (LKKI).
- Nurmaningsih Amriani. (2012) *Mediasi Alternatif Peyeleasaan Sengketa perdata di pengadilan*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.
- Rudy Heavent AR, dkk.(2023), *Penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia*, Purbalingga : Eureka Media Aksara.
- Susanti Adi Nugroho,(2009). *Mediasi Sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.

Sugono Bambang, (2002). *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.

Takdir Rahmadi, (2011), *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan* Jakarta: Mufakat, Raja Wali Pers.

Zainal, Amirudin (2021). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok : Radja Grafindo Persada.

JURNAL

Anjely, Vina. Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Dalam Penyelesaian Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan PLTA Peusangan Di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2022.

Afli Unique. Penyelesaian konflik pertanahan masyarakat kelompok tani makmur sejati (KTMS) Desa Kiyap jaya dengan HGU PY. CDSL, *Skripsi Universitas Suska Riau*. 2016.

B, Harjanto & S,Sukirno. Penyelesaian sengketa lahan masyarakat di konsesnsi tambang PT. Mahakam Sumbar Jaya Kabupaten Kuta Kertanegara. *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro*.Vol.12. No. 1. 2020.

Badaruddin, and Jonathan Pedro Suwarjono. “Studi Analisa Pembangkit Listrik Tenaga Air Alternative Microhydro. *Jurnal Teknik Elektro*.Vol. 4, No. 3. 2013

Cut Nurul Atma. pembebasan lahan PLTA dan penetapan harga tanahnya menurut konsep jual beli dalam fiqh muamala. *Skripsi UIN Ar-raniry*. 2023

Darmika Putu, Hartana. Upaya Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi sebagai jalur alternatif. *Jurnal pendidikan kewarganegaraan*. Vol.10 No. 3.2022.

Farhan, R.. Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dengan hak eigendom (studi kasus sengketa yang melibatkan ahli waris keluarga am dan pt. Pj). *Indonesian nortary*.Vol. 3 No 3. 2021.

Fitriandari, M., & Winata, H.. Manajemen pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Competence: Journal of Management Studies*.Vol. 15 No. 1. 2021.

Hayati, Norma. “Penyelesaian Sengketa Lahan Dengan Pemilik Tanah Antara PT.IDC (Indonesia Tourism Development Corporation).” *Fisheries Research*.Vol. 40, No 1. 2021.

- Hasnan Hasbi, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Arbitrase, *jurnal Hukum Universitas Muslim Indonesia*, Vol. 12 No. 1, 2020
- JDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. “Konsep Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Nasional Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Tulisan Hukum*. Vol 1, No. 25. 2019 . <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/02/TH-pengadaan-tanah.pdf>.
- Kadek, Ni, Cindy Arieska, Komang Febrinayanti Dantes, Muhamad Jodi Setianto, and Universitas Pendidikan Ganesha. MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENETAPAN GANTI KERUGIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN TANAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 (Studi Kasus Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Menyambut KTT G20 Di Nusa Dua). *Skripsi*. Vol. 3 No.2. 2023.
- Manulang Halomoan Sintong David., Penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian sengketa konsumsi (BPSK) Untuk mewujudkan kepastian Hukum. *Tesis Hukum Univesitas Atma Jaya*. 2016
- Manahan Tua Siringo Ringo., Analisis Yuridis pengadaan tanah proyek strategis nasional pada kawasan hutan lindung yang dikuasai oleh masyarakat. *Skripsi Universitas Medan Area*. 2023.
- Meila, dkk. Asas keadilan dalam pengaturan pengadaan tanh untuk kepentingan umum. *Jurnal Megister Ilmu Hukum Universitas Gorontalo*. Vol. 1 No. 4. 2022.
- Mudjino. AlternatifPenyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia melalui Revitalisasi Fungsi badan Peradilan, *Jurnal Hukum*. Vol. 14, No 3, 2022.
- Nurdin Maharani. Akar Konflik pertanahan Indonesia. *Jurnal Hukum Postitum*, Vol. 3 No. 2. 2018
- Puspa Dewi AAI. Percepatan Penyelesaian Kasus Pertanahan Sebagai Salah Satu Tujuan Pengelolaan Pertanahan. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Vol. 11, No.1. 2022.
- Putri Rahmadani, penyelesaian sengketa ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol section Binjai – Pangkalan Brandan berbasis perlindungan hukum. *Jurnal of Academic Literatur*. Vol. 1, No 4. 2022`
- Rahmadani, Putri. “Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Section Binjai-Pangkalan Brandan Berbasis Perlindungan Hukum.” *Locus Journal of Academic Literature Review*. Vol. 1, No.4. 2022.

Semuel Nahumur.dkk. kekuatan hukum sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, dengan studi kasus Putusan PN No. 242/Pdt.G/2020/PN Ambon. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 11. 2023.

Wibowo, Richard Jatimulya Alam. “Konstitusionalitas Pengadaan Tanah Di Ibu Kota Negara Baru Bidang Pertanahan Dalam Perspektif Reforma Agraria. *Majalah Hukum Nasional*. Vol. 52 No.1. 2022.

Peraturan Perundang Undangan

Pasal 33 ayat (3) Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang dikuasai Oleh Negara.

Undang- Undag Normor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.

Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, UU Nomor 19 tahun 2003.

Peraturan Pemerintah Normor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2023.